

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Kedaulatan Rakyat
Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 6

Belum Terlihat, Kontribusi BUMD dalam PAD

SEMARANG (KR) - FPKB DPRD Jateng minta kepada Pemprov Jateng memberikan penjelasan rinci terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Dengan cara tersebut kinerja BUMD bisa dipantau maksimal. Demikian diungkapkan anggota FPKB DPRD Jateng Muhammad Zen Adv, Senin (15/6).

Menurut Zen, BUMD harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD. BUMD memiliki jangkauan perluasan pasar yang tak terbatas, dengan demikian juga memiliki potensi keuntungan tak terbatas pula. Keuntungan inilah nantinya masuk dalam komponen PAD yang mestinya melampaui jumlah pendapatan pajak daerah. Sayangnya, peran BUMD tak terlihat dalam PAD 2019 tersebut. Zen yang juga selaku anggota Komisi E mengatakan, PAD Provinsi Jateng pada 2019 sebesar Rp 14,4 triliun. Dari jumlah itu, komponen penyumbang PAD terbesar adalah pajak daerah Rp 11,9 triliun (82,78%). Dari retribusi daerah Rp 114 miliar (0,80%), dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 512 miliar atau 3,55%, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 triliun atau 12,8%. "Fokus peningkatan PAD dengan optimalisasi BUMD, dampaknya tidak akan terlalu banyak dikeluarkan oleh masyarakat. "Bandingkan dengan semisal menaikkan pajak bumi

bangunan (PBB) atau pajak kendaraan bermotor. Kenaikan ini akan terasa langsung oleh rakyat," tegas Zen.

FPKB juga mengkritik pendapatan keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp 26,3 triliun, yang diperoleh dari PAD hanya Rp 14,4 triliun (55 %). Sementara uang lain berupa pendapatan transfer sebesar Rp 11,3 triliun (44%), dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp 23,1 miliar atau 0,09 %.

Terlihat dalam angka tersebut, nilai transfer sebagai komponen fiskal masih cukup besar.

"Bukan berarti harus dikucilkan dengan mengurangi akses anggaran ke pusat, namun menjadi acuan agar proporsi PAD harus ditingkatkan jumlahnya sampai minimal 70 % dari total pendapatan daerah dengan tata cara yang tidak memberatkan masyarakat," ujar Zen.

Harapannya, dengan proporsi PAD yang besar, Pemprov Jawa Tengah akan memiliki kewenangan lebih luas yang menyangkut kebijakan khusus daerah utamanya kebijakan yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. (Bdi)-o